



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp. (0532) 21195 Fax. (0532) 21504  
**PANGKALAN BUN**

Pangkalan Bun, 11 Maret 2019

Kepada

Yth. Kepala Bappeda Kab.Ktw.Barat  
Cq. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan  
Pelaporan Kab.Ktw.Barat

di -  
Pangkalan Bun

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 300//~~27~~/Kesbang.I/2019

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bersama ini di sampaikan <i>Perbaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2018 Hasil Evaluasi Tim Bappeda</i> pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ktw. Barat	1 (satu) Eksemplar	Di sampaikan dengan hormat untuk diketahui dan bahan seperlunya.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KAB. KTW. BARAT**

**H. MUDELAN, S.Sos**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19600215 198203 1 013

**BAB. IV  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH****A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN****A.05. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat****➤ Kondisi Umum**

Kesatuan bangsa memiliki arti adanya rasa kebersamaan di dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kondisi politik dalam negeri dipengaruhi oleh adanya kemajemukan masyarakat, mulai dari suku bangsa, agama, bahasa daerah, dan juga golongan. Kemajemukan masyarakat merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa, tetapi dapat juga menjadi ancaman atau potensi penyebab konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik.

Begitu juga dengan Kabupaten Kotawaringin Barat yang notabene memiliki heterogenitas masyarakat yang tinggi, apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi konflik yang berbasis SARA. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kerukunan masyarakat dan menjalin komunikasi antar elemen masyarakat di Kotawaringin Barat. Usaha itu di antaranya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Dialog Antar-Umat Beragama/Forum Umat Beriman, serta Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga melakukan program pendidikan politik masyarakat, yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol dan pemerintah di daerah, kegiatan Rapat koordinasi daerah (RAKORDA), Forum Diskusi Politik dalam Pengembangan Pendidikan politik masyarakat dan pelajar, serta Sosialisasi Undang-Undang Parpol bagi Partai Politik peserta Pemilu 2018 guna menyambut persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif. Selain itu juga agar terwujudnya koordinasi dan sinergitas yang baik dan persatuan antar Parpol, ormas dan LSM maka pada Tahun 2018 ini berdasarkan Perubahan Nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telah disusun dan dilaksanakan bentuk program dan kegiatan Pembinaan Ormas dan LSM serta Monitoring Ormas dan LSM sebagai wadah untuk meningkatkan pemahaman bagi Ormas/LSM pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang tugas dan fungsi suatu organisasi kemasyarakatan/LSM kaitanya dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

**A. 05.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2018 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

#### BAB. IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - k. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
    - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
    - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
    - c. Pengadaan mebeleuer
    - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
    - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
    - f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan
    - a. Pengadaan mesin/kartu absensi
    - b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
    - c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
    - a. Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang- Undangan.
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
    - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
    - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
    - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
  6. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan :
    - a. Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
    - b. Pencegahan Dan Penanganan Konflik Sosial
  7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :
    - a. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat;
    - b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
  8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
    - a. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan;
  9. Program Pendidikan Politik Kemasyarakatan, dengan kegiatan :
    - a. Penyuluhan kepada masyarakat;
    - b. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik;
  10. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan, dengan kegiatan :
    - a. Pembinaan Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
    - b. Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

**A. 05.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan total keseluruhan anggaran sebesar **Rp. 5.831.939.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.538.973.337,-** atau **94,98%**, dengan rincian belanja sebagai berikut :

- Besaran anggaran belanja tidak langsung **Rp.3.492.218.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.3.379.319.612,-** atau **96,77%**.
- Besaran anggaran program kegiatan belanja langsung (BL) Sebesar **Rp. 2.339.721.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.159.655.255,-** atau **92,30%**.

Pencapaian kinerja tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan ketentuan daerah atau nasional yang mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban umum.
2. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan, ideologi berbangsa dan bernegara, maupun toleransi bermasyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi dan berbagai penyuluhan.
3. Menambah pemahaman dan wawasan masyarakat tentang politik, organisasi dan lembaga kemasyarakatan melalui pembinaan/sosialisasi dan berbagai penyuluhan baik perorangan maupun suatu perkumpulan organisasi atau partai politik.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan anggaran belanja langsung (BL) sebesar **Rp. 2.339.721.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.159.655.255,-** atau **92,30%**.

Program dan kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat terurai sebagai berikut:

**1. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal adalah menjaga dan memelihara situasi keamanan yang kondusif dan kewaspadaan dini masyarakat serta Pencegahan adanya Potensi Konflik Sosial.

program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dilaksanakan oleh Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sepanjang Tahun 2018 secara berkala dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.  
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.440.700.000,- dan terealisasi Rp.427.881.800,- atau sebesar 97,09 %.

## BAB. IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya situasi daerah yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- a. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2018 dengan bermitra kerja, berkoordinasi dan konsolidasi dengan instansi vertikal yaitu Polres Kobar, Kodim 1014/Pbn, Lanud Iskandar P.Bun, Sub Denpom XII/2-2 P.Bun.
  - b. Sub Kegiatan ini juga melaksanakan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.
  - c. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kekondusifan Daerah disegala bidang di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan yang diharapkan.
2. Pencegahan Dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan pencegahan dan penangan konflik sosial besarnya anggaran Rp.113.375.400,- dan terealisasi Rp.108.323.400,- atau sebesar 95,54 %.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meminimalisir dan pencegahan potensi konflik sosial, menghentikan konflik dan pemulihan pasca konflik dikalangan masyarakat dan umumnya di Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

- a. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2018 dengan sub kegiatan melaksanakan rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2018 dan Pelaporan Rencana Aksi Target Bulan 4 /B.04 Tahun 2018, Rapat Evaluasi RAD-PKS B.04 dan Rencana Pelaporan RAD-PKS Target B.08 Tahun 2018 dan Rapat Evaluasi RAD-PKS B.08 dan Pelaporan RAD-PKS Target B.12.
- b. Hasil dari kegiatan ini adalah Menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, tenteram, damai, dan sejahtera.

### 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya program Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah Mencegah terjadinya konflik yang bernuansa SARA dan mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, besarnya anggaran Rp.333.090.000,- terealisasi Rp.312.420.800,- atau sebesar 93,79 %.dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat dengan Sub Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan anggaran sebesar Rp. 120.875.000,- dan terealisasi Rp. 113.652.000,- atau sebesar 94,02%.
  - a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah menunjang toleransi dan kerukunan di masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2018 dengan terlaksananya forum pembauran kebangsaan.

## **BAB. IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- c. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya rasa solidaritas, saling menghormati, menjaga kerukunan dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.
2. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dengan Sub kegiatan terlaksananya kegiatan Seminar Peristiwa Perjuangan 14 Januari Kumai dan kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB), dengan anggaran sebesar Rp.212.215.000,- dan terealisasi Rp.198.768.800,- atau sebesar 93,66%.
  - a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk menunjang pengembangan wawasan kebangsaan dan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
  - b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I dan IV Tahun Anggaran 2018 dengan terlaksananya Kegiatan peringatan peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai dan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) pada Hari Sumpah Pemuda .
  - c. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat.

### **3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah dalam rangka mewujudkan dan menjaga kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, besarnya anggaran Rp. 101.190.000,- dan terealisasi Rp.89.630.000,- atau sebesar 88,58 %, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan dengan sub kegiatan Forum Kerukunan umat Beragama (FKUB) dan besaran anggarannya Rp.101.190.000,- dan terealisasi Rp. 89.630.000,- atau sebesar 88,58 %.
  - a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatkan dan memelihara kerukunan dan harmonisasi umat beragama dalam kedamaian hidup berdampingan.
  - b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan IV Tahun Anggaran 2018 dengan terlaksananya sosialisasi FKUB dan SKB 3 Menteri di dua kecamatan yaitu Kecamatan Arut selatan dan Kumai.
  - c. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **4. Program Pendidikan Politik Masyarakat**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya program adalah meningkatkan wawasan dan pendidikan politik di masyarakat.

Program Pendidikan Politik Masyarakat dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri besarnya anggaran Rp.226.230.000,- dan terealisasi Rp.207.225.000,- atau sebesar 91,60 %, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dengan sub kegiatan Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka Persiapan

## BAB. IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Anggota DPR/DPD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi pemilih pemula/Pelajar, besaran anggarannya Rp. 196.875.000,- dan terealisasi Rp. 185.270.000,- atau sebesar 94,11 %.

- a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah dengan adanya pembinaan politik bagi masyarakat dan pemilih pemula/pelajar diharapkan memberikan dan menambah pengetahuan tentang Pemilihan Umum Serentak Anggota DPR/DPD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
  - b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II dan III Tahun Anggaran 2018 dengan peserta dari kalangan masyarakat dan pelajar usia 17 Tahun.
  - c. Hasil dari terlaksananya kegiatan ini agar masyarakat pada khususnya Pemilih pemula/pelajar menggunakan hak-hak politiknya untuk pembangunan daerah.
2. Kegiatan Forum-forum diskusi politik dengan sub kegiatan Kegiatan Rapat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan Sosialisasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2018, besaran anggarannya Rp.29.355.000,- dan terealisasi 21.955.000,- atau sebesar 74,79 %.
- a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk menambah wawasan berpolitik dan terciptanya komunikasi antara partai politik.
  - b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II Tahun Anggaran 2018 dengan peserta dari anggota partai politik.
  - c. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan berpolitik khususnya dalam mekanisme pengelolaan administrasi keuangan partai politik.

### 5. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya program adalah meningkatkan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan.

Program Peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan, besarnya anggaran Rp.134.975.000,- dan terealisasi Rp.82.395.000,- atau sebesar 61,04 %, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dengan sub kegiatan pembinaan Ormas/LSM, besaran anggarannya Rp.62.025.000,- dan terealisasi Rp.51.695.000,- atau sebesar 83,35 %.
  - a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas)/LSM dalam berpartisipasi mendukung pembangunan daerah.
  - b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pada triwulan II dan III Tahun Anggaran 2018, dengan peserta dari kalangan masyarakat dan Ormas/LSM.
  - c. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang peranan suatu Ormas/LSM dalam mendukung kinerja pemerintah.

## BAB. IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan sub kegiatan Monev Ormas/LSM dan Rapat Tim Saber Pungli, besaran anggarannya Rp. 72.950.000,- dan terealisasi Rp.30.700.000,-atau sebesar 42,08 %.
  - a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah memonitoring keberadaan dan keaktifan dari Ormas/LSM yang ada dan pemberantasan praktek pungutan liar (pungli) di Kabupaten Kotawaringin Barat
  - b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pada triwulan II, III dan IV Tahun Anggaran 2018, dengan peserta dari panitia Monev Ormas/LSM dan Satgas Saber Pungli.
  - c. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpantaunya dan tersedianya data Ormas dan LSM yang aktif dan tidak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat serta pencegahan terjadinya pungutan liar (pungli) dilingkungan pemerintah kabupaten kotawaringin barat.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT

TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	KET.
1	2	3	4	5
Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	- Jumlah konflik sosial	10 kasus	0 kasus	Berdasarkan capaian kinerja
Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	80%	80%	Berdasarkan capaian kinerja
Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	85%	85%	Berdasarkan capaian kinerja
	Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina	80%	80%	Berdasarkan capaian kinerja
Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Indeks pemahaman politik masyarakat	80%	80%	Berdasarkan capaian kinerja

**Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat**

Dari tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas dapat dijelaskan rincian pencapaian kinerja dari masing-masing indikator sebagai berikut :

**1. Indikator Jumlah Konflik Sosial**

Pada indikator jumlah konflik sosial 10 (sepuluh) kasus target selama Tahun 2018 dengan capaian 0 (nol) kasus, hal ini dapat dikatakan dalam Tahun 2018 tidak ada terjadi kasus terkait konflik sosial dan jika diprosentasekan capaian kinerja yaitu 100%. Hal ini merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memelihara kondusifitas daerah dengan rencana Aksi yaitu :

- Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Tim Pengawasan Orang Asing berdasarkan SK Bupati
- Melakukan Pemantauan dan monitoring di 6 (enam) Kecamatan
- Melaksanakan Rapat Penanganan dan pencegahan konflik sosial dan Rapat Kewaspadaan Dini Masyarakat
- Berkoordinasi dan konsolidasi dengan aparat keamanan daerah (instansi vertikal)
- Menyusun dan melaporkan Rencana Aksi Daerah (RAD) hasil dari pencegahan dan penanganan konflik sosial

Dari beberapa rencana aksi diatas merupakan tolok ukur dalam pencapaian/realisasi indikator jumlah konflik sosial.

**2. Indikator Persentase Pemahaman Ideologi Wawasan Kebangsaan Terhadap Masyarakat Yang Telah Dibina**

Pada indikator Persentase Pemahaman Ideologi Wawasan Kebangsaan Terhadap Masyarakat Yang Telah Dibina target selama Tahun 2018 adalah 80% dengan capaian 80%, hal ini dapat dikatakan dalam Tahun 2018 Badan Kesbangpol telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut capaian kinerja 100%. Hal ini merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memelihara dan menjaga kerukunan dan toleransi antar suku, agama, ras dan golongan dengan rencana Aksi yaitu :

- Berkoodinasi dan konsolidasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai sebagai ujung tombak dalam menjaga keharmonisan dan toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan Badan Kesbangpol sebagai koordinator dan fasilitator.
- Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi lintas suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, masyarakat dan pemuda
- Melaksanakan rapat-rapat dalam bentuk arisan antar anggota FKUB dan FPK
- Melaksanakan safari pada hari-hari besar keagamaan dengan berkunjung ke kediaman para tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Dari beberapa rencana aksi diatas merupakan tolok ukur dalam pencapaian/realisasi indikator Persentase Pemahaman Ideologi Wawasan Kebangsaan Terhadap Masyarakat Yang Telah Dibina.

**3. Indikator Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif**

Pada indikator Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif target selama Tahun 2018 adalah 85% dengan capaian 85%, hal ini dapat dikatakan dalam Tahun 2018 Badan Kesbangpol telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut

## BAB. IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

capaian kinerja 100%. Hal ini merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai koordinator keberadaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang ada didaerah, dengan rencana Aksi yaitu :

- Melaksanakan monitoring keberadaan Organisasi dan lembaga kemasyarakatan di 6 (enam) Kecamatan di kab.Ktw.Barat.
- Mengevaluasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas/LSM untuk menginventarisir status aktif/tidak aktif Ormas/LSM.

Dari beberapa rencana aksi diatas merupakan tolok ukur dalam pencapaian/realisasi indikator Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif.

#### 4. Indikator Persentase Pemahaman Kelembagaan Kemasyarakatan Terhadap Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Yang Telah Dibina

Pada indikator Persentase Pemahaman Kelembagaan Kemasyarakatan Terhadap Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Yang Telah Dibina target selama Tahun 2018 adalah 80% dengan capaian 80%, hal ini dapat dikatakan dalam Tahun 2018 Badan Kesbangpol telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut dengan capaian kinerja 100%. Hal ini merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai fasilitator dalam menambah pengetahuan dan wawasan tentang organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang ada didaerah, dengan rencana Aksi yaitu :

- Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang organisasi dan lembaga kemasyarakatan dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Ormas/LSM.

Dari beberapa rencana aksi diatas merupakan tolok ukur dalam pencapaian/realisasi indikator Persentase Pemahaman Kelembagaan Kemasyarakatan Terhadap Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Yang Telah Dibina

#### 5. Indikator Indeks Pemahaman Politik Masyarakat

Pada indikator Indeks pemahaman politik masyarakat target selama Tahun 2018 adalah 80% dengan capaian 80%, hal ini dapat dikatakan dalam Tahun 2018 Badan Kesbangpol telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut dengan capaian kinerja 100%. Hal ini merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai fasilitator dalam menambah pengetahuan dan wawasan tentang pendidikan politik masyarakat , dengan rencana Aksi yaitu :

- Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang Pendidikan Politik Masyarakat kepada masyarakat dan pemilih pemula/pelajar pada khususnya dan bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawasan Pemilu dan Disdukcapil.
- Melaksanakan Pelatihan penyusunan Laporan Keterangan Bantuan Keuangan Partai Politik bagi anggota Parpol yang ada di daerah.

Dari beberapa rencana aksi diatas merupakan tolok ukur dalam pencapaian/realisasi indikator Indeks Pemahaman Politik Masyarakat.

Faktor – faktor pendorong dan penghambat serta solusi dalam pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Faktor pendukung

- Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat.

2. Faktor penghambat

- Tidak adanya satuan kerja ditingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan yang menangani khusus tugas/fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat.

3. Solusi

- Meningkatkan koordinasi dengan Instansi pemerintah maupun vertikal / Kecamatan / Desa / Kelurahan dalam menangani bidang tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat.

**A. 05.3 Permasalahan dan Solusi**

Dari pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih adanya permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

Koordinasi forum-forum diskusi politik dengan pagu kegiatan sebesar Rp.29.355.000,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 21.955.000,- atau dengan persentase sebesar 74,79 %, hal ini disebabkan pada belanja upah kerja untuk honorarium tim verifikasi bantuan keuangan Parpol pada awal perencanaan dianggarkan 3 (tiga) kali verifikasi pada pelaksanaannya hanya dilaksanakan 2 (dua) kali verifikasi sehingga untuk honorarium tim verifikasi bantuan keuangan Parpol hanya direalisasikan 2 (kali) pembayaran upah kerja untuk tim verifikasi bantuan keuangan Parpol. Kemudian kegiatan sosialisasi bantuan keuangan Parpol/pelatihan penyusunan LPJ Banpol untuk belanja honorarium narasumber dan moderator tidak direalisasikan dikarenakan narasumber dan moderator berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sudah termasuk dalam kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

2. Program peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp.62.025.000,- realisasi keuangan s/d 31 Desember 2018 sebesar Rp.51.695.000,- atau 83,35%, hal ini disebabkan pada belanja sewa gedung untuk pelaksanaan kegiatan tidak direalisasikan dikarenakan kegiatan pembinaan/sosialisasi Ormas/LSM dilaksanakan digedung Kecamatan yang

#### **BAB. IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

notabene merupakan gedung Pemerintah Daerah. Kemudian untuk belanja honorarium narasumber dan moderator tidak direalisasikan dikarenakan narasumber dan moderator berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sudah termasuk dalam kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

- b. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.72.950.000,- realisasi keuangan s/d 31 Desember 2018 sebesar Rp.30.700.000,- atau 42,08%, hal ini disebabkan pada belanja perjalanan dinas luar kota saber pungli rencana kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta tidak terlaksana/dibatalkan dan Kegiatan koordinasi saber pungli tingkat Provinsi di Palangkaraya yang awal rencana dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Saber pungli, pada pelaksanaannya yang diundang oleh panitia Provinsi hanya unsur Ketua Saber Pungli.

#### **Solusi dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut :**

1. Untuk permasalahan pertama agar narasumber dan moderator tidak berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan rapat verifikasi hendaknya dilaksanakan sesuaikan jadwal yang telah disusun agar selaras dengan target perencanaan dan penganggaran.
2. Untuk permasalahan kedua pelaksanaan kegiatan notabene digedung aula Kecamatan sehingga untuk tahun anggaran 2019 tidak ada lagi penganggaran belanja sewa tempat/gedung dan agar narasumber dan moderator tidak berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Untuk permasalahan ketiga lebih meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan unit kerja baik ditingkat Provinsi maupun Pusat.

**BAB. IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**A. 05.4 Lampiran Foto Kegiatan**

No.	Foto	Keterangan Foto
1.	 <p>A group of approximately 20 officials, including police officers and government staff, are posed for a group photo in a large hall. Behind them is a banner that reads: 'PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU SERENTAK DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN DANA PARTAI POLITIK TAHUN 2018'. The banner also features the logos of the local government and the police.</p>	<p align="center"><b>KEGIATAN SOSIALISASI UU/ No.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU SERENTAK DI HOTEL SWISS BELL TGL, 10 APRIL 2018</b></p>
2.	 <p>A wide-angle shot of a large meeting room where many people are seated at round tables covered with yellow tablecloths. The attendees are engaged in discussion or listening to a presentation. The room has high ceilings and large windows.</p>	